

ABSTRAK

ANALISIS TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM PENANGANAN ABRASI PANTAI DI KAWASAN PULAU BAAI KOTA BENGKULU

Oleh: Yulisah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya abrasi pantai di kawasan Pulau Baai Kota Bengkulu yang berdampak pada kerusakan lingkungan pesisir, infrastruktur pelabuhan, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Penanganan abrasi merupakan permasalahan yang kompleks karena melibatkan berbagai aktor dengan kewenangan yang berbeda, sehingga diperlukan tata kelola kolaboratif yang mampu mengintegrasikan peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kolaboratif dalam penanganan abrasi pantai di kawasan Pulau Baai Kota Bengkulu. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah, PT Pelindo (Persero) Cabang Bengkulu, masyarakat, dan lembaga terkait yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam penanganan abrasi pantai di kawasan Pulau Baai telah dilaksanakan melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pelaksanaan berbagai kegiatan kolaboratif. Dialog dan koordinasi antaraktor telah dilakukan melalui rapat, sosialisasi, serta kegiatan lingkungan. Kepercayaan antar pihak mulai terbentuk melalui keterlibatan dalam program bersama. Namun, kolaborasi yang terjalin masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, belum adanya kebijakan terpadu, serta ketidakjelasan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing aktor. Kondisi tersebut menyebabkan hasil kolaborasi dalam penanganan abrasi belum berjalan secara maksimal. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam penanganan abrasi pantai di kawasan Pulau Baai Kota Bengkulu telah berjalan, tetapi belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan komitmen antar pemangku kepentingan, kejelasan kewenangan, serta penyusunan kebijakan kolaboratif yang terintegrasi guna mendukung penanganan abrasi pantai secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tata Kelola Kolaboratif, *Collaborative Governance*, Abrasi Pantai, Penanganan Abrasi.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF COLLABORATIVE GOVERNANCE IN ADDRESSING COASTAL ABRASION IN THE PULAU BAAI AREA BENGKULU CITY

By:

Yulisah

2263201012

This study was motivated by the increasing coastal abrasion in the Pulau Baai area of Bengkulu City, which has caused damage to the coastal environment, port infrastructure, and the social and economic activities of local communities. Addressing coastal abrasion is a complex issue because it involves multiple stakeholders with different authorities, making collaborative governance essential to integrate the roles of government agencies, the private sector, and the community.

This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in addressing coastal abrasion in the Pulau Baai area of Bengkulu City. The study employed a qualitative approach using a descriptive method. The research informants consisted of representatives from government institutions, PT Pelindo (Persero) Bengkulu Branch, local communities, and related institutions selected through purposive sampling. The data were collected through interviews, observations, and documentation. Then, data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings indicate that collaborative governance in addressing coastal abrasion has been implemented through face-to-face dialogue, trust-building, commitment to the collaborative process, shared understanding, and the implementation of various collaborative activities. Dialogue and coordination among stakeholders have been carried out through meetings, public outreach programs, and environmental activities. Trust among stakeholders has gradually developed through their participation in joint programs. However, the collaboration has not yet been fully optimized due to several constraints, including inadequate coordination, limited resources, the absence of an integrated policy framework, and unclear roles and responsibilities among stakeholders. These limitations have reduced the effectiveness of collaborative efforts in addressing coastal abrasion. The study concludes that collaborative governance in managing coastal abrasion in the Pulau Baai area has been implemented but remains suboptimal. Therefore, stronger coordination, greater stakeholder commitment, clearer institutional authority, and the development of integrated collaborative policies are necessary to support effective and sustainable coastal abrasion management.

Keywords: Collaborative Governance, Coastal Abrasion, Coastal Abrasion Management

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan sekitar 17.500 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer. Daerah pesisir memiliki banyak kegunaan yang berbeda, seperti pusat pemerintahan, industri, rumah, pelabuhan, pertambangan, pariwisata, dan pertanian. Oleh karena itu, kebutuhan akan lahan dan fasilitas lainnya semakin meningkat, yang menimbulkan permasalahan baru di wilayah pesisir (Potabuga et al., 2023). Wilayah pesisir memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah karena menjadi pusat kegiatan seperti pelabuhan, perikanan, dan perdagangan antar daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, wilayah pesisir adalah daerah pelestarian ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Batas wilayah pesisir menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional adalah daerah yang masih ada pengaruh kegiatan bahari dan sejauh mana konsentrasi pemukiman nelayan (Witari et al., 2021). Namun, wilayah ini juga sangat rentan mengalami kerusakan lingkungan terutama akibat abrasi pantai.

Abrasi pantai merupakan proses pengikisan daratan oleh gelombang laut sehingga menyebabkan berkurangnya area pantai, rusaknya ekosistem pesisir, dan terancamnya aset infrastruktur maupun pemukiman masyarakat (Kurniasih, 2023).

Oleh karena itu, pengelolaan kawasan pesisir secara efektif menjadi kebutuhan penting dalam rangka melindungi wilayah dari kerusakan lingkungan.

Kondisi abrasi yang semakin parah menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menjaga keberlanjutan kawasan pesisir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2023) mencatat bahwa abrasi telah merusak lebih dari 41 ribu hektar wilayah pantai di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa abrasi bukan hanya persoalan alam, tetapi juga persoalan tata kelola dan kebijakan publik yang belum berjalan efektif. Kawasan pesisir membutuhkan pengelolaan yang terintegrasi antara aspek lingkungan, ekonomi, dan kelembagaan agar dampaknya dapat diminimalisir secara berkelanjutan.

Wilayah yang mengalami permasalahan abrasi cukup serius salah satunya adalah kawasan Pulau Baai di Kota Bengkulu, abrasi pantai di kawasan Pulau Baai Kota Bengkulu semakin menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan terutama di sekitar area Pantai Lentera Merah dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI). Berdasarkan hasil observasi awal dan laporan dari media lokal (Mayasari & Musriadi, 2021) menjelaskan bahwa titik Lentera Merah mengalami penyusutan dengan terlihatnya daratan terkikis, beberapa pohon bakau dan tiang listrik milik PT Pertamina dan warga tumbang akibat hantaman gelombang laut yang kuat. Warga sekitar menyebut fenomena tersebut telah berlangsung beberapa tahun dan semakin parah saat musim angin barat.

Fenomena abrasi semakin mengarah ke area pemukiman warga sekitar dan dikhawatirkan dapat mengganggu keberlanjutan lingkungan jika tidak segera ditangani. Warga menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi kehilangan lahan

tempat tinggal serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi pesisir. Kondisi ini semakin mendukung perlunya intervensi berbasis tata kelola kolaboratif karena keberlanjutan kawasan pesisir melibatkan banyak kepentingan, baik lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

Laporan media online (Izfaldi, 2025) juga menunjukkan kerusakan fasilitas pelabuhan pendaratan ikan (PPI) Pulau Baai akibat pengeroposan struktur dermaga yang disebabkan gelombang pasang. Beberapa bagian tempat penyandaran kapal nelayan mengalami ambruk sehingga menyulitkan proses bongkar muat hasil tangkapan. Kondisi ini menimbulkan risiko keselamatan kerja bagi nelayan dan menghambat aktivitas ekonomi berbasis perikanan di kawasan tersebut. Fenomena kerusakan infrastruktur pesisir semakin mempertegas urgensi penanganan abrasi melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.

Abrasi yang berkelanjutan di wilayah tersebut bukan hanya berdampak pada sektor lingkungan, tetapi juga menimbulkan potensi kerugian ekonomi dan sosial, terutama karena lokasi Pulau Baai merupakan wilayah strategis aktivitas pelabuhan utama dan pemukiman penduduk lokal. Kerentanan kawasan tersebut perlu menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak lebih luas jika tidak ditangani secara tepat. Abrasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan berkurangnya produktivitas wilayah pesisir (Hidayat, 2019)

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang wilayah pesisir di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 adalah undang-undang tentang perubahan atas undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-undang ini mengubah Undang-

Undang sebelumnya untuk mengatur secara lebih rinci mengenai pengelolaan pesisir, serta pembagian kewenangan antara pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota (Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, 2014).

Permasalahan di kawasan Pulau Baai menjadi kompleks karena melibatkan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan berbeda. Secara administratif, kawasan tersebut termasuk dalam wilayah Pemerintah Kota Bengkulu, tetapi secara pengelolaan berada di bawah PT Pelindo (Persero) Cabang Bengkulu, yang merupakan BUMN di sektor kepelabuhanan. Kondisi ini memunculkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan tanggung jawab dalam menangani abrasi. Menurut (Kristian, 2023) konflik kewenangan antarlembaga sering menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan lingkungan di Indonesia.

Persoalan abrasi di Pulau Baai mencerminkan lemahnya sistem tata kelola kolaboratif dalam konteks administrasi publik. Menurut (Ansell & Gash, 2008), tata kelola kolaboratif adalah bentuk pengelolaan yang melibatkan berbagai aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan permasalahan publik melalui proses dialog dan pengambilan keputusan bersama. Prinsip utama tata kelola kolaboratif adalah membangun kepercayaan, partisipasi inklusif, dan komitmen bersama dalam mencapai tujuan bersama.

Minimnya kejelasan mengenai kebijakan terkait penanggulangan abrasi di kawasan Pulau Baai memperlihatkan lemahnya koordinasi antaraktor pemerintah dan perusahaan negara. Hingga kini belum ada kebijakan terpadu yang mengatur

peran setiap pihak dalam mitigasi abrasi. Menurut Indarti & Ahira (2025) menjelaskan bahwa mitigasi abrasi membutuhkan penanganan terpadu karena upaya mitigasi oleh pemerintah sering kali terkendala keterbatasan anggaran, personel teknis, dan tidak optimalnya koordinasi antar sektor. Koordinasi belum sepenuhnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, PT Pelindo selaku pengelola pelabuhan, masyarakat lokal, NGO lingkungan, dan instansi terkait lainnya.

Pendekatan tata kelola kolaboratif menjadi relevan untuk diterapkan dalam penanganan abrasi pantai karena masalah ini bersifat lintas sektor dan memerlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan, serta masyarakat. (Emerson et al., 2012) menjelaskan bahwa kolaborasi yang efektif ditandai dengan adanya komunikasi terbuka, kepemimpinan fasilitatif, dan kesediaan berbagi tanggung jawab. Dalam konteks Pulau Baai, penerapan prinsip ini dapat memperjelas peran setiap aktor dan memperkuat koordinasi dalam upaya perlindungan lingkungan pesisir.

Tidak hanya faktor kelembagaan, minimnya kesadaran lingkungan juga memperparah kondisi abrasi. Masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan masih memanfaatkan area pantai tanpa memperhatikan aspek konservasi, seperti menebang vegetasi mangrove dan membuang limbah ke laut. partisipasi masyarakat merupakan pilar utama dalam tata kelola lingkungan karena masyarakat adalah pihak yang paling terdampak langsung oleh perubahan ekosistem pesisir. Oleh sebab itu, peran masyarakat dalam kolaborasi harus diperkuat melalui edukasi dan pemberdayaan.

Perspektif administrasi publik menjadi landasan penting dalam penelitian ini untuk memahami sejauh mana tata kelola kolaboratif berjalan dalam penanganan abrasi pantai di kawasan Pulau Baai, Kota Bengkulu. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan dan peluang kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi bagi pembentukan mekanisme kerja sama yang lebih jelas, transparan, dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanganan Abrasi Pantai Di Kawasan Pulau Baai Kota Bengkulu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tata kelola kolaboratif dalam penanganan abrasi pantai di kawasan Pulau Baai Kota Bengkulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk tata kelola kolaboratif dalam penanganan abrasi pantai di kawasan Pulau Baai Kota Bengkulu

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya pada kajian tata kelola

kolaboratif (*collaborative governance*) dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya pesisir. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tema kolaborasi antar lembaga pemerintah dan BUMN dalam isu lingkungan

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan bagi Pemerintah Kota Bengkulu dan PT Pelindo (Persero) Cabang Bengkulu dalam menyusun strategi penanganan abrasi pantai yang terintegrasi. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pembentukan mekanisme koordinasi lintas kelembagaan serta penyusunan *memorandum of understanding (MoU)* yang lebih jelas mengenai pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat pesisir dan pemangku kepentingan lokal mengenai pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan pantai. Dengan adanya tata kelola kolaboratif yang efektif, diharapkan upaya mitigasi abrasi dapat berjalan lebih berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar Pulau Baai.